

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 124 ayat (21, Pasal 178 ayat (21, dan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan nrmah negara serta sinkronisasi dengan peraturan penrndang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
	<p>Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
	<p align="center">Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) diubah sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.</p> <p>6. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.</p> <p>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.</p> <p>8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p>	

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p align="center">BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</p>	
<p align="center">Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	
<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:</p> <p>a. APBD, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uang representasi; 2. tunjangan keluarga; 3. tunjangan beras; 4. uangpaket; 5. tunjangan jabatan; 6. tunjangan alat kelengkapan; dan 7. tunjangan alat kelengkapan lain. <p>b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tunjangan komunikasi intensif; dan 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>2. tunjangan reses.</p> <p>(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>	
<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka I diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota.</p> <p>(3) Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.</p> <p>(4) Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75%</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>(tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.</p>	
<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 5</p> <p>Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p align="center">Pasal 6</p> <p>Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.</p> <p>(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen); c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>dari tunjangan jabatan ketua DPRD.</p> <p>(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.</p>	
<p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:</p> <p>a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;</p> <p>b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan</p> <p>c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;</p> <p>dari uang representasi ketua DPRD.</p>	
<p align="center">Bagian Kedua</p> <p align="center">Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	
	<p>1. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:</p> <p>a. jaminan kesehatan;</p> <p>b. jaminan kecelakaan kerja;</p> <p>c. jaminan kematian; dan</p>	<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:</p> <p>a. jaminan kesehatan;</p> <p>b. jaminan kecelakaan kerja;</p> <p>c. jaminan kematian; dan</p> <p>d. pakaian dinas dan atribut.</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>d. pakaian dinas dan atribut.</p> <p>(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas/jabatan; dan c. belanja rumah tangga. <p>(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi. 	<p>(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan perorangan dinas; dan c. belanja rumah tangga. <p>(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.
<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.</p> <p>(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.</p>	
<p align="center">Pasal 11</p> <p>Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 12</p> <p>(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam I (satu) tahun; b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>tahun;</p> <p>c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;</p> <p>d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun; dan</p> <p>e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada.</p>	
	<p>2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan</p>	<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</p>	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.</p> <p>(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.</p> <p>(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.</p>	<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
	<p>4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan</p>	<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>sumpah/janji.</p> <p>(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.</p> <p>(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.</p>	<p>dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan sala.h satu tunjangan perumahan.</p> <p>(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.</p>
	<p>5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 16</p> <p>Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.</p>	<p align="center">Pasal 16</p> <p>Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.</p>
	<p>6. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga 17 berbunyi sebagai berikut:</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.</p> <p>(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.</p>	<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.</p> <p>(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.</p> <p>(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam perkada</p>	<p>Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.</p>
<p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(3) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perkada.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.</p>	
<p align="center">Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	
	<p>7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.</p> <p>(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:</p> <p>a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;</p> <p>b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;</p> <p>c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;</p>	<p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.</p> <p>(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:</p> <p>a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;</p> <p>b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;</p> <p>c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan</p> <p>e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.</p> <p>(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.</p> <p>(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.</p>	<p>d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan</p> <p>e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.</p> <p>(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.</p> <p>(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.</p>
<p align="center">BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD</p>	
<p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:</p> <p>a. program, yang terdiri atas:</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>1. penyelenggaraan rapat;</p> <p>2. kunjungan kerja;</p> <p>3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;</p> <p>4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;</p> <p>5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan</p> <p>6. program lain sesuai dengan fungsi, hrgas, dan wewenang DPRD;</p> <p>b. dana operasional Pimpinan DPRD;</p> <p>c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;</p> <p>d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan</p> <p>e. belanja sekretariat fraksi.</p> <p>(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p align="center">Pasal 21</p> <p>Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.</p> <p>(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5).</p> <p>(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 121 disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;</p> <p>3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;</p> <p>b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:</p> <p>1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;</p> <p>2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;</p> <p>3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD.</p> <p>(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:</p> <p>a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut bumpsum; dan</p> <p>b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling</p>	

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, elisiensi, dan akuntabilitas.</p>	
<p align="center">Pasal 23</p> <p>(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat ditakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p align="center">Pasal 24</p> <p>(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.</p> <p>(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.</p> <p>(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>di lingkungan kantor secretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.</p>	
<p align="center">BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</p>	
<p align="center">Pasal 26</p> <p>(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uarrg jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah secretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Anggaran belaqja DPRD selqgaimans dimaksud pada ayat (1) merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari APBD.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p align="center">BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	
<p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 28</p> <p>Ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p align="center">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 29</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan Pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 30</p> <p>Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi papua, provinsi papua Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.</p>	
<p align="center">Pasal 31</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 32</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p align="center">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017</p> <p align="center">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>	<p align="center">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2023</p> <p align="center">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2017</p> <p align="center">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2023</p> <p align="center">MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO</p>

<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023</p>
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 106</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 6</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, H. Sokib</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Lydia Silvana Djaman</p>